

Analisis Wacana Krirtis Teun A. Van Dijk Pada Pidato Menhut Tentang Bencana Aceh-Sumut November 2025

Ningrum ButarButar¹

Novita Marpaung²

Herlina Desiani Siregar³

¹²³Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

¹ningrummelatibutarbutar@gmail.com

²novitamarpaung879@gmail.com

³herlinadesianisiregar2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pidato Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengenai bencana banjir di Aceh dan Sumatera Utara pada November 2025 menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun A. van Dijk. Kajian difokuskan pada tiga dimensi wacana, yaitu makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur, untuk mengungkap konstruksi makna, ideologi, serta strategi bahasa yang digunakan dalam teks pidato. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumentasi. Data penelitian berupa teks pidato resmi menteri kehutanan yang diperoleh dari sumber daring terpercaya. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menafsirkan struktur makro, superstruktur, dan mikrostruktur wacana sesuai dengan model Teun A. van Dijk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato tersebut menekankan tema empati terhadap korban bencana sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan. Secara struktural, pidato disusun secara sistematis melalui pembukaan persuasif, isi argumentatif, dan penutup yang bersifat ajakan. Pada tataran mikrostruktur, ditemukan penggunaan strategi bahasa yang berfungsi membangun legitimasi kebijakan serta membingkai bencana sebagai momentum refleksi dan tanggung jawab bersama. Penelitian ini menegaskan bahwa pidato berperan tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat pembentukan wacana dan citra kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: *analisis wacana kritis, bencana aceh-sumut, pidato menteri kehutanan; teun a. van dijk*

Pendahuluan

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium fundamental dalam pembentuk realitas sosial, penyebaran ideologi, dan penegasan relasi kekuasaan di tengah masyarakat. Melalui penggunaan bahasa, suatu peristiwa atau fenomena sosial dapat direpresentasikan, dibingkai, serta dimaknai sedemikian rupa guna melayani kepentingan pihak tertentu. Dalam ranah komunikasi publik, khususnya pidato pejabat negara, bahasa memiliki fungsi strategis untuk membangun persepsi publik, melegitimasi kebijakan pemerintah, dan mengarahkan sikap masyarakat terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, kajian bahasa dalam sebuah teks harus ditempatkan dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi proses produksinya agar makna yang terdandung dapat dipahami secara utuh. Salah satu pendekatan yang dianggap paling relevan untuk membedah hubungan kompleks antara bahasa dan kekuasaan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK).

Analisis Wacana Kritis, menurut Darma (2009:49), merupakan suatu proses intelektual untuk menjelaskan teks sebagai bentuk praktik sosial yang merepresentasikan realitas tertentu, baik realitas yang sedang berlangsung maupun yang sengaja dikonstruksi oleh individu atau kelompok dengan kepentingan ideologis tertentu. Dalam perspektif ini, wacana tidak pernah dipahami sebagai sesuatu yang netral, melainkan sebagai sarana ideologis yang dapat digunakan untuk mempertahankan, melegitimasi, atau bahkan menantang struktur kekuasaan dan dominasi sosial. Fairclough (1995) dan van Dijk (2009) menegaskan bahwa ideologi sering kali bekerja secara halus dan implisit melalui pilihan bahasa, sehingga diperlukan analisis kritis untuk mengungkap makna-makna tersembunyi di balik struktur teks yang tampak formal.

Yoce (2009:63) menyatakan bahwa wacana berfungsi sebagai media yang memungkinkan kelompok berkuasa memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat, sekaligus memperkuat posisi ideologis mereka. Sejalan dengan itu, van Dijk (1997, dalam Yoce, 2009:64) menjelaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam praktik komunikasi sering kali menerima representasi tersebut sebagai kebenaran yang wajar dan tidak dipersoalkan. Dengan demikian, analisis terhadap wacana publik, seperti pidato pejabat pemerintah, menjadi penting untuk melihat bagaimana realitas sosial dikonstruksi dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Dalam kajian linguistik, wacana dipahami sebagai satuan bahasa tertinggi dalam struktur gramatikal. Kridalaksana (2008:259) menjelaskan bahwa wacana merupakan kesatuan bahasa yang lengkap, mencakup ide, gagasan, dan konsep yang disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami secara utuh oleh pembaca atau pendengar. Istilah wacana berasal dari kata **vacana** dalam bahasa Sanskerta yang berarti bacaan, kemudian berkembang dalam bahasa Jawa Kuna dan Jawa Baru dengan makna bicara atau ucapan, hingga akhirnya digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai istilah yang merujuk pada tuturan atau teks yang utuh. Dalam linguistik modern, istilah wacana digunakan sebagai padanan kata **discourse** dalam bahasa Inggris (Baryadi, 2002:2).

Teun A. van Dijk mengemukakan bahwa struktur wacana terdiri atas tiga tingkatan, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro berkaitan dengan makna global teks atau tema utama yang diangkat (Pratama & Abidin, 2020). Superstruktur merujuk pada kerangka atau skema organisasi teks, seperti bagian pembuka, isi, dan penutup (Purnamasari & Doni, 2021). Sementara itu, struktur mikro berkaitan dengan aspek kebahasaan yang lebih rinci, yang meliputi unsur semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik (Retanto et al., 2020). Ketiga struktur tersebut saling berkaitan dalam membentuk makna dan ideologi yang disampaikan melalui teks.

Pidato Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengenai bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara pada November 2025 menjadi objek kajian yang menarik dalam penelitian ini. pidato tersebut merupakan bentuk wacana institusional yang sarat dengan muatan ideologis dan kepentingan kebijakan. Melalui retorika yang disampaikan, pemerintah tidak sekedar menyalurkan informasi dan empati bagi korban bencana, tetapi juga sedang membangun narasi tertentu terkait akar penyebab masalah, pembagian tanggung jawab, serta peran negara dalam upaya pemulihan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam struktur makro, superstruktur, dan mikro dalam pidato Menteri Kehutanan tersebut dengan model Teun A. van Dijk. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana strategi bahasa digunakan untuk membangun legitimasi

kekuasaan dan bagaimana realitas social terkait bencana direpresentasikan dalam wacana resmi pemerintah.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk. Pemilihan metode kualitatif ini didasari oleh kebutuhan untuk membedah secara mendalam makna-makna implisit, muatan ideologi, serta relasi kekuasaan yang berkelindan dalam teks pidato, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Moleong, 2017).

Objek utama penelitian adalah teks pidato resmi Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, yang disampaikan sebagai respons terhadap bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh dan Sumatera Utara pada November 2025. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, yakni dengan mengambil transkrip pidato resmi dari sumber daring pemerintah yang kredibel. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik ketekunan pengamatan serta triangulasi teori dengan merujuk pada literatur yang relevan sebagai landasan interpretasi.

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengoperasionalkan tiga tingkatan struktur wacana van Dijk yaitu makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur. Pada tingkat makrostruktur, tahap ini difokuskan untuk menemukan tema sentral atau gagasan global yang memayungi seluruh isi pidato. Penentuan tema dilakukan dengan mengidentifikasi topik-topik dominan yang muncul secara konsisten untuk memahami pesan utama yang ingin disampaikan pemerintah.

Pada tingkat superstruktur, pada tahap ini, peneliti mengkaji skema atau kerangka organisasi teks yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Tujuannya adalah untuk memetakan bagaimana alur argumentasi disusun secara sistematis guna mengarahkan persepsi audiens terhadap isu bencana.

Selanjutnya, pada tingkat mikrostruktur, merupakan analisis paling mendalam yang mencakup empat aspek kebahasaan yang meliputi aspek semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik. Pada aspek semantik, kajian difokuskan pada latar, detail, maksud, dan praanggapan yang muncul dalam pidato untuk melihat bagaimana realitas bencana dikonstruksi. Pada aspek sintaksis, analisis mencakup bentuk kalimat, koherensi antarkalimat, serta penggunaan kata ganti (pronomina) yang menunjukkan posisi dan relasi antara penutur, pemerintah, dan masyarakat terdampak. Aspek stilistik dianalisis melalui pilihan leksikal yang digunakan penutur untuk menggambarkan bencana, tanggung jawab, dan peran pemerintah. Sementara itu, aspek retorik dikaji dengan menelaah penggunaan strategi penekanan makna, seperti repetisi, metafora, dan penegasan, yang berfungsi memperkuat pesan ideologis dalam pidato (van Dijk, 1997; Eriyanto, 2011).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara membaca teks secara cermat, mengklasifikasikan data berdasarkan kategori struktur wacana van Dijk, serta menafsirkan data dengan mengaitkannya pada konteks sosial dan situasi bencana yang melatarbelakangi produksi pidato. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan dan penggunaan teori yang relevan sebagai dasar interpretasi (Moleong, 2017).

Hasil dan pembahasan

Analisis Data Berdasarkan Teori Analisis wacana kritis Teun A.van Dijk

Pidato menteri kehutanan raja juli Antoni yang disampaikan dalam konteks bencana banjir di Aceh dan Sumatera Utara merupakan bentuk wacana institusional yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ideologis dan relasi kekuasaan. dalam perspektif analisis wacana kritis Teun A.van Dijk, teks pidato ini perlu dipahami sebagai praktik sosial yang berfungsi membangun makna tertentu, sekaligus mengarah cara pandang publik terhadap bencana dan kebijakan kehutanan.

Analisis Makro struktur

Pada tataran makrostruktur, sebagaimana dikemukakan Van Dijk, analisis difokuskan pada makna global atau tema utama yang menaungi keseluruhan teks. Data menunjukkan bahwa makro struktur pidato ini dibangun melalui tema sentral duka cita atas bencana banjir disertai ajakan menjadi peristiwa tersebut sebagai momentum evaluasi kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan. Tema ini menunjukkan bahwa bencana tidak dibingkai semata-mata sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Dengan mengangkat isu evaluasi kebijakan sebagai bagian dari makna global, penutur secara ideologis mengarahkan audiens untuk menerima bahwa kebijakan kehutanan merupakan faktor penting dalam terjadinya bencana. Menurut Van Dijk (1997), makrostruktur berfungsi menentukan apa yang dianggap penting dalam wacana, sehingga audiens diarahkan untuk memaknai bencana dalam kerangka tanggung jawab struktural dan kebijakan negara.

Analisis superstruktur

Pada tingkat superstruktur, pidato ini memperlihatkan skema teks yang tersusun secara sistematis, yang mencerminkan strategi komunikasi khas wacana kekuasaan. Pidato diawali dengan pembukaan empatik berupa ungkapan duka cita kepada korban bencana. Dalam teori Van Dijk, bagian pembukaan ini berfungsi membangun legitimasi moral penutur agar pesan selanjutnya dapat diterima tanpa resistensi.

Selanjutnya, pidato bergerak ke bagian isi dengan memaparkan langkah-langkah konkret pemerintah seperti pemberian legalitas hutan adat, penerbitan kawasan hutan serta relokasi warga dari kawasan konservasi. Penyusunan ini menunjukkan bahwa superstruktur digunakan untuk mengiring audiens secara bertahap, dari simpati emosional menuju penerimaan terhadap kebijakan pemerintah.

Analisis mikrostruktur

Aspek semantik, secara semantik, data menunjukkan bahwa latar bencana disajikan secara spesifik dengan menyebut wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Penyebutan ini berfungsi memperkuat kesan faktual dan meningkatkan legitimasi tindakan pemerintah. Selain itu, detail mengenai legalitas hutan adat dan penerbitan kawasan hutan ditampilkan untuk menonjolkan Citra pemerintah sebagai aktor yang aktif dan solutif. Terdapat pula beranggapan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat adat lebih berkelanjutan dan bawa defore ilegal merupakan penyebab utama bencana. Tanggapan ini tidak diperdebatkan dalam teks sehingga diterima sebagai kebenaran umum. Menurut Van Dijk strategi beranggapan merupakan cara ideologi bekerja secara implisit dan wacana.

Aspek sintaksis

Dari segi sintaksis, pidato didominasi oleh kalimat deklaratif yang menegaskan posisi otoritatif menteri kehutanan sebagai representasi negara. Kalimat-kalimat ini berfungsi menyampaikan sikap resmi pemerintah sekaligus memperlihatkan relasi kuasa antara penutur dan audiens.

Selain itu, penggunaan kalimat ajakan menunjukkan upaya persuasif untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung kebijakan. Dalam perspektif AWK, struktur sintaksis semacam ini tidak netral, melainkan berfungsi mengarahkan sikap publik agar sejalan dengan kepentingan institusional pemerintah.

Aspek stilistik dan retorik

Pada aspek stilistik, pilihan diksi yang bernuansa empati seperti ungkapan kepedulian dan keprihatinan, dipadukan dengan istilah kebijakan dan lingkungan. Kombinasi ini membentuk citra pemerintah sebagai pihak yang humanis sekaligus bertanggung jawab secara struktural.

Secara restoris, pidato menempatkan bencana sebagai "momentum" refleksi kebijakan. Strategi ini berfungsi membingkai peristiwa tragis sebagai peluang legitimasi kebijakan sehingga kritik terhadap pemerintah dapat diminimalkan dan dialihkan menjadi dukungan terhadap agenda penataan ulang kehutanan.

Pembahasan kritis

Berdasarkan analisis data menggunakan teori analisis wacana krisis Teun A. van Dijk, dapat disimpulkan bahwa pidato menteri kehutanan merupakan praktik wacana ideologis yang berfungsi membangun legitimasi kebijakan dan memperkuat peran negara. Bahasa digunakan tidak hanya untuk menyampaikan empati, tetapi juga untuk mengonstruksi pemahaman publik bahwa evaluasi kebijakan kehutanan adalah respon yang logis dan niscaya terhadap bencana. Dengan demikian, pidato ini mempresentasikan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus melalui bahasa dalam wacana kebencanaan.

Tabel Analisis Wacana

Struktur Wacana	Elemen	Hasil Analisis makrostruktur
Makrostruktur	Tema besar	Tema ini mencerminkan gagasan utama yang menaungi seluruh wacana. Kutipan muncul di awal teks sebagai landasan emosional untuk memenangkan empati publik sebelum masuk ke pembahasan kebijakan yang lebih teknis. Secara ideologis, tema ini membingkai bencana bukan sebagai takdir semata, melainkan akibat dari ketidakseimbangan tata kelola hutan. Tema global: Duka cita atas bencana banjir dan urgensi evaluasi kebijakan kehutanan. Kutipan: "Atas nama Kementerian Kehutanan saya mengucapkan bela sungkawa duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di

		Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.”
	Topik Global	Topik global menunjukkan fokus utama pidato, yaitu evaluasi kebijakan kehutanan sebagai respons terhadap bencana banjir. Topik global: Duka cita atas bencana banjir dan evaluasi kebijakan kehutanan “Atas nama Kementerian Kehutanan saya mengucapkan bela sungkawa duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.”
	Makna global	Makna global menekankan pesan ideologis bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam, tetapi akibat kesalahan manusia dan kebijakan. Banjir sebagai dampak kerusakan hutan dan deforestasi ilegal Kutipan: Fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri terjadi deforestasi di sana secara ilegal, menjadi kebun secara ilegal dan ini momentum kita untuk memperbaiki.”
	Tujuan Komunikasi	Pidato bersifat Persuasif, bertujuan Memperoleh Dukungan publik Terhadap langkah Evaluasi dan Penataan ulang Kebijakan Kehutanan. Membangun dukungan publik dan legitimasi kebijakan pemerintah

Struktur Wacana	Elemen	Hasil Analisis superstruktur
Superstruktur	Pembukaan	Berfungsi membangun kedekatan emosional dan legitimasi moral dengan menyampaikan empati melalui ucapan duka cita kepada korban

		bencana.
	Pendahuluan	Menghubungkan bencana dengan konteks sosial yang lebih luas untuk menggiring audiens memahami perlunya refleksi atau evaluasi kebijakan.
	Isi	Memaparkan hubungan kerusakan hutan dengan banjir serta menyajikan solusi konkret (SK Hutan Adat, relokasi, dan restorasi). Adat, relokasi, dan restorasi).
	Penutup	Memperkuat pesan utama dan mengajak dukungan publik untuk menyukseskan perbaikan tata kelola hutan. Kutipan: "Terjadi deforestasi secara ilegal, menjadi kebun secara ilegal dan ini momentum kita untuk memperbaiki." "Dengan dukungan publik yang luar biasa akan banyak hal yang bisa kita selesaikan."

Struktur Wacana Mikrostruktur	Elemen	Hasil Analisis mikrostruktur
Semantik	Latar	Penyebutan lokasi spesifik (Aceh Utara, Langkat) digunakan untuk menguatkan konteks keseriusan peristiwa dan legitimasi respons

		pemerintah
	Detail	Penggunaan angka numerik (394 KK, 405 hektar) memberikan kesan bahwa tindakan pemerintah bersifat konkret, terukur, dan nyata Kutipan paragraf 6: “394 KK sudah bersedia direlokasi...”, “405 hektar hutan adat mereka”
	Maksud	Membangkitkan bencana bukan hanya sebagai musibah, tetapi sebagai legitimasi untuk melakukan pembenahan kebijakan kehutanan. Kutipan paragraf 4: “ini juga momentum yang baik Untuk kita melakukan Evaluasi kebijakan...”
	Peranggapan	Adanya asumsi bahwa masyarakat adat adalah pihak paling efektif dalam menjaga hutan, sehingga klaim tersebut tidak diperdebatkan lagi. Kutipan: “masyarakat Adat yang selama ini paling mampu menjaga hutan”
Sintaksis	Bentuk kalimat	Kalimat deklaratif digunakan untuk menegaskan empati dan sikap resmi negara, sekaligus memperlihatkan posisi otoritatif menteri. Kutipan: “saya mengucapkan bela sungkawa duka mendalam...”
	Koherensi	Koherensi dibangun melalui hubungan sebab-akibat antara peristiwa bencana dan perlunya evaluasi kebijakan.

		Pembaca diarahkan untuk menerima bahwa evaluasi adalah respons logis terhadap duka yang terjadi. Kutipan: “duka yang mendalam tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan”
	Kata ganti	Paragraf 4: “semua kita merasakan apa yang terjadi...” Kata ganti inklusif “kita” digunakan untuk membangun kesan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menghapus jarak kekuasaan.
Stilistik	Leksikon	Pemilihan diksi atau leksikon yang bersifat emotif dan retorik (seperti “semua mata melihat, semua telinga mendengar”) digunakan untuk membangun empati serta meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak bencana. Paragraf 4: “semua mata melihat, semua telinga mendengar” Leksikon yang bersifat emotif dan retorik digunakan untuk membangun empati serta meningkatkan kesadaran publik terhadap bencana dan dampaknya.
Retoris	Grafis	Penggunaan judul yang mencolok seperti “Duka Cita Mendalam” dan “Momentum Evaluasi Kebijakan” berfungsi untuk mengarahkan persepsi pembaca sejak awal dan menegaskan fokus utama teks.

	Metafora	Paragraf 4: “pendulumnya terlalu ke ekonomi dan harus ditarik ke tengah lagi” Metafora “pendulum” Penggunaan metafora “pendulum” (menarik keseimbangan ekonomi kembali ke tengah/ekologi) digunakan untuk menyederhanakan persoalan kebijakan yang rumit agar lebih mudah dipahami dan persuasif bagi masyarakat.
--	----------	---

Simpulan

Model Analisis Wacana Kritis dengan pendekatan Teun A. van Dijk dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pidato Menteri Kehutanan mengenai bencana banjir di Aceh dan Sumatera Utara pada November 2025 tidak sekadar berfungsi sebagai penyampaian informasi resmi, melainkan juga sebagai praktik wacana yang memuat nilai ideologis dan relasi kekuasaan. Melalui analisis makrostruktur, dapat dipahami bahwa tema utama pidato dirumuskan secara terarah untuk menonjolkan kepedulian pemerintah sekaligus menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan. Pada tataran superstruktur, pengorganisasian teks pidato mulai dari bagian pembuka, pemaparan isi, hingga penutup disusun secara sistematis guna mengarahkan penafsiran pendengar terhadap pesan yang ingin ditekankan. Selanjutnya, pada tingkat mikrostruktur, penggunaan latar, pemilihan detail informasi, penyampaian maksud, serta pembentukan praanggapan menunjukkan adanya strategi bahasa yang berfungsi memperkuat makna tertentu dan membingkai peran pemerintah dalam wacana kebencanaan. Dari aspek sintaksis, pemilihan bentuk kalimat, keterpaduan antarbagian wacana, serta penggunaan pronomina berkontribusi dalam membangun citra otoritas dan hubungan sosial antara pembicara dan masyarakat. Selain itu, unsur stilistika dan retorika tampak melalui pemilihan diksi dan penekanan tertentu yang bertujuan memengaruhi sikap serta persepsi khalayak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa model Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk efektif digunakan untuk mengungkap makna implisit, ideologi, dan mekanisme kekuasaan yang tersembunyi di balik pidato pejabat publik, khususnya dalam konteks wacana bencana dan kebijakan lingkungan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan serta penyusunan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengapresiasi dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan secara berkesinambungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan penyediaan referensi yang relevan, serta rekan-rekan yang turut memberikan dukungan moral dan

berpartisipasi dalam diskusi akademik selama proses penelitian berlangsung. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembaca.

Daftar Pustaka

<https://www.kehutan.go.id/news/menhut-sampaikan-duka-cita-mendalam-bencana-banjir-yang-melanda-aceh-sumut-jadikan-momentum-evaluasi-kebijakan>

- Eriyanto. (2011). Analisis wacana: Pengantar analisis teks media. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Van Dijk, T. A. (1997). Discourse as social interaction. London: Sage Publications.
- Van Dijk, T. A. (2009). Society and discourse: How social contexts influence text and talk. Cambridge: Cambridge University Press.
- Baryadi, I. P. (2002). Dasar-dasar analisis wacana dalam ilmu bahasa. Yogyakarta: Pustaka Gondho Suli.
- Darma, Y. A. (2009). Analisis wacana kritis. Bandung: Yrama Widya.
- Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. London: Longman.
- Kridalaksana, H. (2008). Kamus linguistik (Edisi ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, A., & Abidin, Y. (2020). Analisis struktur makro dalam teks berita. Jurnal Bahasa dan Sastra, 15(2), 101–110.
- Purnamasari, D., & Doni, R. (2021). Superstruktur teks dalam analisis wacana kritis. Jurnal Linguistik Terapan, 4(1), 45–56.
- Retanto, A., et al. (2020). Struktur mikro dalam model analisis wacana Teun A. van Dijk. Jurnal Kajian Bahasa, 7(2), 88–97.
- Van Dijk, T. A. (1997). Discourse as social interaction. London: Sage Publications.
- Van Dijk, T. A. (2009). Society and discourse: How social contexts influence text and talk. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yoce, A. (2009). Analisis wacana kritis: Sebuah pengantar. Bandung: Refika Aditama.